

Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo

Dameria Naibaho¹, Bernadetta Anita Jerry Simbolon², Darmawati Simanjuntak³,

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email Address:

damerianaibaho@polmed.ac.id¹, bernadettaanitaajerryjsimblon@polmed.ac.id², darmawatisimanjuntak@polmed.ac.id³

ARTICLE INFORMATION	ABSTRACT
<p>Received: 20 Juni 2025 Revised: Accepted: 27 Juni 2025 Published: 30 Juni 2025</p>	<p><i>This study aims to analyze the financial performance of the Karo Regency Government by using the Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio of Regional Original Income, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio. This research method is a descriptive, qualitative method, with a population of the Karo Regency local government in 2019-2020. The data needed is the 2016-2020 Karo Regency Government Financial Report which was collected using documentation techniques. The test results show that the Financial Performance of the Karo Regency Government is quite good, we can see from the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, and Harmony Ratio</i></p> <p><i>Keywords : Independence, Effectiveness, Efficiency, Local Revenue, Financial Performance</i></p>
	ABSTRAK
	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karo dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif, dengan populasi pemerintahan daerah Kabupaten Karo tahun 2019-2020. Data yang dibutuhkan merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo cukup baik dapat kita lihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian.)</p> <p>Kata Kunci: Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan</p>

INTRODUCTION

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan instrumen dan tata tertib yang mengatur mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan pemerintah daerah, melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta memastikan ketaatan penyajian serta kesesuaian penyajian laporan menurut kaidah peraturan perundang-undangan.

Untuk menilai kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Analisis ini mencerminkan kemandirian fiskal pemerintah daerah, efisiensi, efektivitas dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah.

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dapat diakibatkan oleh adanya penurunan penerimaan objek pajak air dan tanah, menurunnya penerimaan dana kapitasi khususnya BPJS serta pengujian kendaraan bermotor belum terakreditasi sehingga pendapatan melalui retribusi tidak dapat terealisasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi penyusunan APBD. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui perkembangan “Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, Periode 2016-2020 dilihat dari Rasio Keuangannya”

THE ORETICAL REVIEW

Ibnu Syamsi (1986:199) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah mencakup kemampuan untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut (M. Abdullah, 2014:4) Kinerja adalah prestasi kerja adalah hasil dari implementasi rencana kerja oleh suatu institusi yang dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan (SDM) yang bekerja di instansi baik pemerintah maupun perusahaan (bisnis). Moeheriono dalam bukunya M. Abdullah, (2014:3) menambahkan bahwa kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, visi dan misi suatu organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim 2007:231).

Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai rasio keuangan seperti Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja. Rasio-rasio ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh atas pengelolaan keuangan daerah, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pencapaian hasil akhir. Penggunaan analisis rasio keuangan ini sangat berguna tidak hanya bagi pihak eksekutif daerah dalam menyusun APBD yang lebih tepat sasaran, tetapi juga bagi pemerintah pusat, masyarakat, dan kreditor sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, artikel ini akan menilai dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016–2020.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo yang beralamat di Jl. Djamin Ginting No. 17 Kabanjahe. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara, serta data sekunder yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku- buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara untuk memperoleh data primer dari responden, serta data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo. Sementara itu, Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengetahui nilai

masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain.

RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat.

Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Perangkat Daerah Kabupaten Karo. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka perlu membentuk dan menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Karo yang penetapannya dengan Peraturan Daerah yakni No. 05 Tahun 2016. Berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) tersebut maka terbentuklah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

Hasil pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup jenis data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo. Rangkaian elemen-elemen yang akan digunakan untuk mengolah data sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli daerah yang digunakan dalam menghitung rasio ini adalah total realisasi penerimaan dari pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain 27 Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan pendapatan transfer yang digunakan dalam menghitung rasio ini adalah total realisasi penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat dari dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dalam satu tahun anggaran. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKKDt = \frac{PADt}{PTt} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

RKKDt = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun t

PADt = Realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah pada tahun t

PTt = Realisasi penerimaan dari Pendapatan Transfer pada tahun t

Untuk menghitung rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo masing-masing untuk tahun 2016-2020, maka 2 (dua) elemen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Karo sebagai berikut :

Tabel 1. Rrasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Realisasi, dalam Rupiah)	Pendapatan Transfer (Realisasi, dalam Rupiah)	Rasio Kemandirian (2/3*100%)
1	2	3	$4 = \frac{2}{3} \times 100\%$
2016	99.913.302.299,16	1.040.055.892.716,00	9,60%
2017	157.866.720.976,13	959.269.973.779,00	16,45%
2018	159.189.197.472,28	941.257.217.088,00	16,91%
2019	117.683.657.832,91	977.630.358.355	12,03%
2020	100.169.149.077,49	861.506.117.288	11,62%

Tabel 2. Capaian Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Karo :

Tahun	RKKD (dalam %)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan	Naik/Turun (dalam %)
2016	9,60	Rendah Sekali	Instruktif	
2017	16,45	Rendah Sekali	Instruktif	71,35
2018	16,91	Rendah Sekali	Instruktif	2,80
2019	12,03	Rendah Sekali	Instruktif	-28,86
2020	11,62	Rendah Sekali	Instruktif	-3,41
Mean	13,32	Rendah Sekali		

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Target Pendapatan Asli Daerah. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$REPADt = \frac{PADt}{TPADt} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

REPADt = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada tahun t

PADt = Realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah pada tahun t

TPADt = Target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah pada tahun t

Untuk menghitung rasio Kesenjangan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karo masing-masing untuk tahun 2016-2020, maka kedua elemen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Karo, berikut tabel kedua elemen laporan realisasi anggaran :

Tabel 3. Rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karo

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Realisasi, dalam Rupiah)	Pendapatan Transfer (Realisasi, dalam Rupiah)	Rasio Kemandirian (2/3*100%)
1	2	3	$4 = \frac{2}{3} \times 100\%$
2016	231.098.360.314,96	1.542.011.009.415,52	14,98%
2017	335.935.240.977,11	1.520.826.759.117,97	22,08%
2018	222.116.791.413,00	1.397.789.814.252,00	15,89%
2019	196.427.858.443,54	1.530.469.300.382,69	12,83%
2020	111.466.265.790,00	1.274.173.567.965,00	8,74%

Tabel 4. Capaian Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	REPAD (dalam %)	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Naik/Turun (dalam %)
2016	106,24	Efektif	
2017	109,16	Efektif	2,75
2018	106,63	Efektif	-2,32
2019	112,14	Efektif	5,17
2020	111,91	Efektif	-0,21
Mean	109,21	Efektif	

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari perbandingan antara Belanja Daerah dengan Pendapatan Daerah. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$REKDt = \frac{BDt}{PDt} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

REKDt = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

BDt = Realisasi Belanja Daerah pada tahun t

PDt = Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun t

Untuk menghitung rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo masing-masing untuk tahun 2016-2020, maka kedua elemen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Karo sebagai berikut :

Tabel 5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Realisasi, dalam Rupiah)	Pendapatan Transfer (Realisasi, dalam Rupiah)	Rasio Kemandirian (2/3*100%)
1	2	3	$4 = \frac{2}{3} \times 100\%$
2016	1.542.011.009.415,52	1.456.336.375.056,16	105,88%
2017	1.520.826.759.117,97	1.453.205.992.340,13	104,65%
2018	1.397.789.814.252,00	1.495.138.180.332,28	93,48%
2019	1.530.469.300.382,69	1.424.075.254.493,91	107,47%
2020	1.274.173.567.965,00	1.222.348.472.907,49	104,23%

Tabel 6. Capaian Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	REKD (dalam %)	Efisiensi Keuangan	Naik/Turun (dalam %)
2016	105,88	Tidak Efisien	
2017	104,65	Kurang Efisien	-1,16
2018	93,48	Tidak Efisien	-10,67
2019	107,47	Tidak Efisien	14,97
2020	104,23	Tidak Efisien	-3,01
Mean	103,14	Tidak Efisien	

4. Rasio Keserasian Belanja

Ada 2 (dua) perhitungan dalam rasio Keserasian Belanja, yaitu Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Rasio Keserasian Belanja Modal.

a. Rasio Keserasian Belanja Operasi

Rasio Keserasian Belanja Operasi merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari perbandingan antara Belanja Operasi dengan Belanja Daerah.

Rasio Keserasian Belanja Operasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKBOt = \frac{BOt}{BDt} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

RKBOt = Rasio Keserasian Belanja Operasi pada tahun t

BOt = Realisasi Belanja Operasi pada tahun t

BDt = Realisasi Belanja Daerah pada tahun t

Untuk menghitung rasio Keserasian Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karo masing-masing untuk tahun 2016-2020, maka kedua elemen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Karo, yakni realisasi Belanja Operasi dan realisasi Belanja Daerah dijadikan sebagai komponen pembentuk rasio Keserasian Belanja Operasi. Kedua elemen Laporan Realisasi Anggaran tersebut serta perhitungan rasio Keserasian Belanja Operasi ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Rasio Keserasian Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karo

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Realisasi, dalam Rupiah)	Pendapatan Transfer (Realisasi, dalam Rupiah)	Rasio Kemandirian (2/3*100%)
1	2	3	$4 = \frac{2}{3} \times 100\%$
2016	859.528.663.211,00	1.542.011.009.415,52	55,74%
2017	810.442.291.332,00	1.520.826.759.117,97	53,28%
2018	852.425.457.925,00	1.397.789.814.252,00	60,98%
2019	968.603.295.232,00	1.530.469.300.382,69	63,28%
2020	869.090.100.828,00	1.274.173.567.965,00	68,20%

Tabel 8. Capaian Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	RKBO (dalam %)	Keserasian Belanja	Naik/Turun (dalam %)
2016	55,74	Cukup serasi	
2017	53,28	Cukup serasi	-4,41
2018	60,98	serasi	14,45
2019	63,28	serasi	3,77
2020	68,20	serasi	7,77
Mean	60,29	serasi	

b. Rasio Keserasian Belanja Modal

Sebaliknya Rasio Keserasian Belanja Modal merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari perbandingan antara Belanja Modal dengan Belanja Daerah. Rasio Keserasian Belanja Operasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKBMt = \frac{BMt}{BDt} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan:

RKBMt = Rasio Keserasian Belanja Modal pada tahun t

BMt = Realisasi Belanja Modal pada tahun t

BDt = Realisasi Belanja Daerah pada tahun t

Untuk menghitung rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karo masing-masing untuk tahun 2016-2020, maka kedua elemen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Karo, yakni realisasi Belanja Modal dan realisasi Belanja Daerah dijadikan sebagai komponen pembentuk rasio Keserasian Belanja Modal. Kedua elemen Laporan Realisasi Anggaran tersebut serta perhitungan 32 rasio Keserasian Belanja Modal ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9. Rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karo

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Realisasi, dalam Rupiah)	Pendapatan Transfer (Realisasi, dalam Rupiah)	Rasio Kemandirian (2/3*100%)
1	2	3	$4 = \frac{2}{3} \times 100\%$
2016	231.098.360.314,96	1.542.011.009.415,52	14,98%
2017	335.935.240.977,11	1.520.826.759.117,97	22,08%
2018	222.116.791.413,00	1.397.789.814.252,00	15,89%
2019	196.427.858.443,54	1.530.469.300.382,69	12,83%
2020	111.466.265.790,00	1.274.173.567.965,00	8,74%

Tabel 10. Capaian Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	RKBM (dalam %)	Keserasian Belanja	Naik/Turun (dalam %)
2016	14,98	Tidak serasi	
2017	22,08	Kurang serasi	47,40
2018	15,89	Tidak serasi	-28,03
2019	12,83	Tidak serasi	-19,26
2020	8,74	Tidak serasi	-31,88
<i>Mean</i>	14,90	Tidak serasi	

CONCLUSION

Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan, serta pembahasan mengenai Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Karo dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo memiliki kemandirian keuangan yang tergolong sangat rendah dengan Pola Hubungan yakni Instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo kurang mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.
2. Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Karo selama tahun 2016-2020 mencapai diatas 100% termasuk kedalam kategori efektif, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Karo dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkannya sudah efektif.
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo dibawah 100% tergolong kurang efisien. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten Karo tergolong tidak efisien.
4. Rasio Keserasian Pemerintah Kabupaten Karo

- a. Capaian Rasio Keserasian Belanja Operasi memiliki nilai rata-rata sebesar 60,29% dengan kriteria keserasian terhadap Belanja Daerah dikategorikan sebagai serasi.
- b. Capaian Rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karo memiliki nilai rata-rata sebesar 14,90% dengan kriteria keserasian terhadap Belanja Daerah dikategorikan tidak serasi.

REFERENCE

Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo.

Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.

Kasmir, 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Mahsun, Mohammad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja. Bandung : Refika Aditama.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mulyadi. 2007. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba Empat. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2007. Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press.

Syamsi, Ibnu. 1986. Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional. Jakarta: CV Rajawali.

Utami, Anasela Tri. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Tugas Akhir. Prodi Akuntansi, Politeknik Negeri Medan.

Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja. Edisi Keempat, Rajawali Press, Jakarta. Wulandar, Anita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal dan Administrasi Publik Vol. 3 No.2 November.